

Representasi Kritik Kebijakan Publik dalam Meme Politik di Media Sosial Indonesia: Analisis Semiotika Roland Barthes

Dian Nurvita Sari^{1*}, Umar Farisal²

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, Indonesia

E-mail: diannurvitasari25@gmail.com¹, umar.farisal@gmail.com²

Article History:

Received: 15 Juni 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 31 Juli 2026

Keywords: *Public Opinion*
Digital Communication;
Political Memes; Public
Criticism; Public Opinion;
Social Media.

Abstract: *The development of digital media has transformed the way people express criticism toward public policy. One of the increasingly dominant forms of digital communication is internet memes, which are widely used to convey social and political criticism through satire, humor, and visual symbols. This study aims to analyze the symbolic meanings contained in political memes related to public policy issues in Indonesia and examine their role in shaping public opinion in digital spaces. This research uses a qualitative approach with Roland Barthes' semiotic analysis focusing on denotation, connotation, and myth. The research objects consist of three viral memes related to the increase in LPG prices, the Free Nutritious Meal (MBG) program, and the 12% VAT policy circulating on social media during 2024–2025. Data collection techniques were carried out through documentation, literature study, and in-depth interviews with meme creator @fakkartun. The findings reveal that political memes function not only as entertainment but also as alternative political communication media that represent public anxiety toward government policies. Through humor and satire, memes simplify complex policy issues into visual narratives that are easier to understand and disseminate in digital spaces. The study also demonstrates that memes contribute to the formation of collective opinion and strengthen public participation in online discussions regarding policy issues. This research confirms that memes have become part of contemporary digital public discourse and represent a new form of criticism in social media culture.*

Kata Kunci: Komunikasi
Digital; Kritik Publik; Media
Sosial; Meme Politik; Opini
Publik.

Abstrak: Perkembangan media digital telah mengubah pola masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Salah satu bentuk komunikasi digital yang semakin dominan adalah meme internet yang digunakan untuk menyampaikan kritik sosial dan politik melalui satire, humor, dan

simbol visual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna simbolik dalam meme politik terkait kebijakan publik di Indonesia serta melihat perannya dalam pembentukan opini publik di ruang digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes yang menelaah lapisan denotasi, konotasi, dan mitos. Objek penelitian terdiri atas tiga meme viral terkait kenaikan harga gas elpiji, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan kebijakan PPN 12% yang beredar di media sosial selama 2024–2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam dengan kreator meme @fakkartun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meme politik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan digital, tetapi juga menjadi medium komunikasi politik alternatif yang merepresentasikan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Melalui humor dan satire, meme mampu menyederhanakan isu kebijakan yang kompleks menjadi narasi visual yang lebih mudah dipahami dan disebarluaskan di ruang digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa meme berkontribusi terhadap pembentukan opini kolektif dan memperkuat partisipasi publik dalam diskusi daring mengenai isu kebijakan. Temuan penelitian menegaskan bahwa meme telah menjadi bagian dari wacana publik digital kontemporer sekaligus bentuk baru kritik sosial di era media sosial.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital, khususnya media sosial, telah mengubah pola komunikasi masyarakat dalam menyampaikan opini dan kritik sosial. Platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas (Sari & Ganiem, 2021; Sari & Basit, 2020). Salah satu bentuk komunikasi digital yang semakin populer adalah meme, yang digunakan untuk menyampaikan kritik sosial dan politik secara kreatif dan mudah dipahami (Purwaningrum, 2020). Di Indonesia, meme semakin sering digunakan untuk mengkritik kebijakan pemerintah, tokoh politik, dan isu sosial (Suhantoro, 2024). Meme memainkan peran penting dalam mencerminkan dan membentuk persepsi publik selama pemilihan presiden, masalah kebijakan publik dan isu sosial yang ada di Indonesia (Purwaningrum, 2020; Wijaya, 2021; Darlius, 2024). Dengan gaya satir dan humor, meme mampu menarik perhatian publik serta memicu diskusi di media sosial (Nugroho, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa meme bukan hanya hiburan, tetapi juga alat advokasi yang mampu menciptakan kesadaran kolektif dan mobilisasi sosial terhadap kebijakan publik (Astuti, 2019; Suhantoro, 2024). Penelitian ini akan menganalisis meme-meme yang mengandung kritik terhadap berbagai kebijakan publik nasional, seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, dan digitalisasi, yang sempat viral atau mendapat

perhatian tinggi di media sosial selama kurun waktu tahun 2024–2025.

Meme politik sering kali mengemas isu dengan bahasa visual yang sederhana, tetapi penuh makna, sehingga memengaruhi bagaimana khalayak memandang suatu kebijakan (Prihantoro et al., 2024). Dalam konteks tersebut, meme internet muncul sebagai salah satu bentuk komunikasi digital yang paling populer di media sosial. Meme tidak hanya dipahami sebagai hiburan visual semata, tetapi juga sebagai medium komunikasi yang memuat kritik sosial dan politik melalui penggunaan humor, satire, ironi, dan simbol visual. Meme memiliki karakteristik yang singkat, mudah dipahami, dan mudah disebarluaskan sehingga efektif menarik perhatian masyarakat digital, terutama generasi muda (Putra et al., 2023). Dengan sifatnya yang ringan, satir, dan mudah dipahami, meme dapat menjangkau khalayak luas serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik sosial secara kreatif (Aminulloh et al., 2023).

Fenomena penggunaan meme sebagai sarana kritik terhadap kebijakan pemerintah semakin terlihat dalam berbagai isu publik di Indonesia. Berbagai kebijakan seperti kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% menjadi objek kritik masyarakat melalui meme yang viral di media sosial. Meme-meme tersebut tidak hanya menghadirkan humor, tetapi juga merepresentasikan keresahan sosial, ketidakpercayaan publik, dan bentuk resistensi simbolik terhadap kebijakan negara.

Kajian mengenai meme politik telah banyak dilakukan dalam penelitian komunikasi digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meme memiliki kemampuan membangun opini publik dan menjadi bagian dari budaya politik digital (Purwaningrum, 2020; Putra et al., 2023). Meme politik juga dipandang sebagai bentuk komunikasi partisipatif karena memungkinkan masyarakat terlibat dalam produksi pesan politik secara kreatif dan informal. Selain itu, meme mampu membentuk framing tertentu terhadap isu sosial dan politik melalui kombinasi teks dan visual yang sederhana namun sarat makna. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada meme sebagai fenomena budaya populer atau strategi komunikasi politik secara umum. Penelitian yang secara spesifik mengkaji meme sebagai medium kritik kebijakan publik di Indonesia, terutama melalui pendekatan semiotika Roland Barthes, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan aspek representasi visual, sementara keterkaitan antara simbol meme dan pembentukan opini publik digital belum banyak dibahas secara mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis meme kebijakan publik di Indonesia dengan menempatkan meme sebagai bentuk komunikasi kritik di ruang digital. Penelitian ini juga mencoba menjelaskan bagaimana humor, satire, dan simbol visual dalam meme membentuk makna sosial serta memperkuat partisipasi publik dalam diskursus kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes yang menitikberatkan pada tiga lapisan makna, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana meme bekerja sebagai tanda budaya yang tidak hanya merepresentasikan realitas sosial, tetapi juga membangun ideologi tertentu di masyarakat digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna simbolik dalam meme kritik kebijakan publik di media sosial serta menjelaskan peran meme dalam membentuk opini publik di era komunikasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada interpretasi makna

simbolik dalam meme digital yang berkaitan dengan kritik kebijakan publik.

Objek penelitian terdiri atas tiga meme viral yang beredar di media sosial Instagram dan Twitter/X selama periode 2024–2025, yaitu meme mengenai kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan kebijakan PPN 12%. Pemilihan meme dilakukan secara purposive berdasarkan tingkat viralitas, relevansi isu, dan intensitas diskusi publik di media sosial.

Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi meme, studi pustaka, dan wawancara mendalam dengan kreator meme @fakkartun sebagai informan utama. Wawancara dilakukan untuk memahami motivasi kreator dalam memproduksi meme kritik kebijakan publik. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model semiotika Roland Barthes dengan tahapan:

1. Mengidentifikasi makna denotatif pada elemen visual dan teks meme.
2. Menganalisis makna konotatif yang muncul melalui simbol, satire, dan humor.
3. Menginterpretasikan mitos atau ideologi sosial yang dibangun dalam meme.

Metode penelitian berisi jenis penelitian, subjek atau objek penelitian, teknik pengumpulan, analisis data, dan keabsahan data.

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian menggunakan triangulasi sumber melalui perbandingan hasil analisis visual dengan hasil wawancara dan kajian literatur terkait komunikasi digital dan meme politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meme sebagai Representasi Kritik Kebijakan Publik

Tabel 1. Tabel Analisis Semiotika

Gambar Meme	Makna Denotasi	Makna Konotasi	Mitos
Gambar 1 Meme Gas Elpiji 3 Kg  (ilustrasi pak Effendi mewakili masyarakat yang sulit mencari gas Elpiji 3 kg)	Gambar Pak Effendi yang viral menyuarakan sulitnya masyarakat mencari tabung gas 3 kg dengan tulisan “Jangan ganggu kemiskinan kami!”	Menggambarkan keresahan masyarakat kecil yang kesulitan mendapatkan energi murah, meskipun seharusnya subsidi ditujukan untuk mereka.	Narasi keadilan sosial: pemerintah dianggap gagal memenuhi janji “energi untuk rakyat kecil”. Subsidi hanya menjadi ilusi keadilan. Kebijakan yang tidak berlandaskan prosedur yang matang malah menyulitkan masyarakat.
Gambar 2 Meme Makan Bergizi Gratis (MBG) 	Gambar makanan gratis dengan teks satir “Anak keracunan MBG, orangtua keracunan janji manis” menggambarkan bahwa program ini lebih sebagai janji politik.	Sindiran bahwa program lebih menguntungkan citra politik daripada menyelesaikan masalah gizi dan kesejahteraan.	Politik populis: pemerintah (atau elite politik) lebih mementingkan pencitraan dibanding kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

(visual wadah MBG bukan berisi makanan sehat tetapi bakteri penyebab keracunan)			
Gambar 3 Meme PPN 12%  (potongan drama Korea dengan ekspresi sedih, teks soal pajak naik)	Cuplikan karakter sedih dari drama Korea dengan teks “Mereka mengambil semua uangku padahal penghasilanku kecil”.	Menyimbolkan penderitaan rakyat akibat kebijakan pajak yang menambah beban hidup.	Beban rakyat kecil: pemerintah dianggap memihak pada stabilitas fiskal daripada kesejahteraan rakyat, meneguhkan mitos bahwa “rakyat selalu jadi korban kebijakan”.

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes terhadap tiga meme kebijakan publik yang beredar di media sosial, ditemukan bahwa meme tidak hanya berfungsi sebagai hiburan digital, tetapi juga sebagai medium kritik sosial dan politik yang merepresentasikan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Analisis dilakukan melalui tiga lapisan makna, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos untuk melihat bagaimana pesan kritik dibangun melalui visual, teks, dan humor satire.

Pada meme pertama mengenai kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, makna denotatif terlihat melalui visual Pak Effendi yang viral di media sosial dengan ungkapan “Jangan ganggu kemiskinan kami!”. Secara literal, meme tersebut menggambarkan kesulitan masyarakat kecil dalam memperoleh gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Pada tingkat konotasi, meme ini menyiratkan kritik terhadap distribusi subsidi pemerintah yang dianggap tidak tepat sasaran dan justru menyulitkan masyarakat miskin. Sementara itu, pada tingkat mitos, meme membangun narasi bahwa kebijakan ekonomi pemerintah sering kali tidak berpihak kepada rakyat kecil. Subsidi dipersepsikan hanya sebagai simbol keadilan sosial, tetapi implementasinya dinilai belum mampu memberikan kesejahteraan secara nyata.

Meme kedua mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan visual wadah makanan yang bukan berisi makanan sehat, melainkan bakteri penyebab keracunan. Secara denotatif, meme ini menampilkan kritik terhadap program MBG melalui teks satir “Anak keracunan MBG, orangtua keracunan janji manis”. Pada level konotasi, meme tersebut merepresentasikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap implementasi program pemerintah yang dianggap lebih berorientasi pada pencitraan politik dibanding penyelesaian masalah gizi masyarakat. Humor satire dalam meme digunakan sebagai bentuk resistensi simbolik untuk menyampaikan kritik secara lebih ringan, namun tetap memiliki muatan politik yang kuat. Pada tingkat mitos, meme membangun pandangan bahwa kebijakan populis sering kali lebih menekankan aspek simbolik dan popularitas politik dibanding substansi kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, meme ketiga mengenai kebijakan PPN 12% menampilkan potongan drama Korea dengan ekspresi sedih disertai teks “Mereka mengambil semua uangku padahal penghasilanku kecil”. Pada level denotasi, meme memperlihatkan ekspresi emosional akibat kenaikan pajak. Secara konotatif, meme tersebut menyimbolkan penderitaan masyarakat kecil yang merasa terbebani oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Penggunaan potongan drama Korea

menunjukkan bagaimana budaya populer digunakan untuk memperkuat pesan emosional agar lebih mudah diterima publik digital. Pada level mitos, meme membangun narasi bahwa rakyat kecil selalu menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan fiskal negara. Pemerintah dipersepsikan lebih mengutamakan stabilitas ekonomi dibanding kesejahteraan masyarakat bawah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meme bekerja sebagai bentuk komunikasi kritik di ruang publik digital. Humor, satire, dan simbol visual dalam meme membuat isu kebijakan publik yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep ruang publik digital Habermas yang menjelaskan bahwa media sosial menjadi arena baru bagi masyarakat untuk menyampaikan opini dan kritik secara partisipatif. Selain itu, meme juga memperlihatkan karakter budaya partisipatif sebagaimana dijelaskan Jenkins, di mana pengguna media sosial tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen pesan kritik sosial.

Melalui pendekatan semiotika Roland Barthes, penelitian ini menegaskan bahwa meme bukan sekadar gambar lucu atau hiburan internet, melainkan bentuk representasi ideologi dan keresahan sosial masyarakat digital. Meme menjadi medium alternatif komunikasi politik yang mampu membentuk opini publik, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah di era media sosial.

Humor dan Satire sebagai Strategi Komunikasi Kritik

Penelitian menemukan bahwa humor dan satire merupakan elemen utama dalam meme politik digital. Humor memungkinkan kritik terhadap pemerintah disampaikan secara lebih fleksibel dan mudah diterima publik. Melalui pendekatan satir, meme mampu mengemas isu kebijakan yang kompleks menjadi pesan visual sederhana yang cepat dipahami masyarakat.

Dalam meme program Makan Bergizi Gratis (MBG), penggunaan visual makanan yang dikaitkan dengan isu keracunan menjadi simbol kritik terhadap implementasi program pemerintah. Meme tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan humor untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan publik.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa meme bekerja sebagai bentuk resistensi simbolik di ruang digital. Kritik tidak lagi disampaikan melalui narasi formal seperti artikel opini atau demonstrasi fisik, melainkan melalui budaya populer digital yang lebih mudah tersebar di media sosial.

Meme dan Pembentukan Opini Publik Digital

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meme memiliki kontribusi terhadap pembentukan opini publik digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan kreator meme @fakkartun, meme dibuat untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat.

Menurut informan, masyarakat digital cenderung lebih tertarik pada konten visual singkat dibandingkan berita panjang. Kondisi ini membuat meme menjadi medium yang efektif dalam menyampaikan kritik sekaligus membangun diskusi publik.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa viralitas meme di media sosial memperkuat penyebaran opini kolektif mengenai suatu kebijakan. Ketika meme dibagikan secara berulang, masyarakat tidak hanya mengonsumsi humor, tetapi juga membentuk pemahaman bersama mengenai isu yang sedang dikritik.

Dalam konteks ini, meme berfungsi sebagai bagian dari ruang publik digital sebagaimana dijelaskan Habermas. Media sosial memungkinkan masyarakat memproduksi kritik secara

.....

partisipatif dan mendistribusikannya secara luas tanpa bergantung pada media arus utama.

Meme sebagai Bentuk Partisipasi Politik Digital

Meme digital dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat di era media sosial. Produksi dan distribusi meme menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi menjadi audiens pasif, tetapi turut aktif membentuk wacana publik.

Partisipasi tersebut terlihat dari interaksi pengguna media sosial melalui komentar, repost, dan modifikasi meme yang terus berkembang mengikuti isu publik. Meme akhirnya menjadi sarana komunikasi politik alternatif yang mampu menjembatani kritik masyarakat dengan dinamika kebijakan negara.

Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa budaya digital telah mengubah pola komunikasi politik masyarakat. Kritik terhadap kebijakan publik kini tidak hanya hadir dalam ruang formal, tetapi juga melalui praktik budaya populer berbasis visual yang berkembang di media sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meme politik di media sosial memiliki peran penting sebagai medium kritik kebijakan publik di era digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa meme politik berfungsi sebagai medium komunikasi politik alternatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik secara partisipatif melalui humor dan satire. Meme tidak hanya merepresentasikan keresahan sosial, tetapi juga membentuk opini kolektif dalam ruang publik digital.

Melalui pendekatan semiotika Roland Barthes, ditemukan bahwa meme tidak hanya mengandung makna literal, tetapi juga menyimpan makna konotatif dan ideologis yang merepresentasikan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Humor dan satire dalam meme menjadi strategi komunikasi yang efektif dalam menyampaikan kritik sosial secara ringan namun tetap memiliki muatan politik yang kuat. Meme juga berfungsi sebagai bentuk partisipasi politik digital karena memungkinkan masyarakat terlibat dalam produksi dan distribusi wacana kritik secara terbuka di media sosial.

Penelitian ini menegaskan bahwa meme telah berkembang menjadi bagian dari ruang publik digital kontemporer yang mampu membentuk opini kolektif masyarakat terhadap isu kebijakan publik. Dengan demikian, meme tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai hiburan internet, melainkan sebagai medium komunikasi politik alternatif yang relevan dalam studi komunikasi digital.

DAFTAR REFERENSI

- Aminulloh, M., Rahayu, N., & Haryanto, S. (2023). Meme politik sebagai strategi propaganda pada pemilu 2019 di Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 7(2), 203–220. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/16115>
- Astuti, P. I., Arumi, S., Pratiwi, V. U., & Suryono, J. (2019). Analisis implikatur dalam wacana meme politik pada akun Instagram. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 13(2), 93–105.
- Bülow, L., & Johann, M. (2023). Effects and perception of multimodal recontextualization in political internet memes: Evidence from two online experiments in Austria. *Frontiers in Communication*, 7, Article 1027014. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.1027014>
- Darlius, A. N. S., Aprilia, F., & Neisya. (2024). Public perceptions of Indonesia's 2024 presidential candidates: A social media meme semiotic analysis. *JOLIT Journal of*
-

- Languages and Language Teaching*, 12(4), 2004–2015.
<https://doi.org/10.33394/joltt.v12i4.12219>
- Darlius, D., Arini, R., & Hidayat, A. (2025). Semiotic analysis of presidential candidate memes: Public perception through digital humor. *Journal of Languages and Language Teaching*, 13(1), 35–47. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/joltt/article/view/12219>
- Denisova, A. (2019). *Internet memes and society: Social, cultural, and political contexts*. Routledge.
- Dewi, R. S. (2019). Kreator meme dan konstruksi makna meme politik di media sosial. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(1). <https://doi.org/10.24815/jkg.v8i1.13332>
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hafidz, J. Z., Nurfalah, F. S., Pradana Ramadhan, M. A., Kaerudin, P., Harahap, V. J., & Elok, K. (2023). Peran media sosial dalam penyampaian aspirasi masyarakat untuk perubahan yang lebih baik. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), 147–155. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108>
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University Press.
- Mohd Nizah, M. A., Abu Bakar, A. R., Zahran, M. A., & Mohd Mokhtar, M. A. (2024). The influence of political memes on political marketing strategy in Malaysia. *Journal of Public Administration and Governance*, 14(1), 118–131. <https://doi.org/10.5296/jpag.v14i1.21881>
- Nissenbaum, A., & Shifman, L. (2018). Meme templates as expressive repertoires in a globalizing world. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 23(6), 293–310.
- Nugroho, Y. (2020). The role of internet memes in political communication. *Jurnal Komunikasi Digital*, 12(1), 45–60.
- Penyang, T. (2024). *Satirical meme as a form of political discourse: Semiotics and power relations in Indonesian online political humor* (Master's thesis, Universitas Gadjah Mada). UGM Repository. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/248961>
- Prihantoro, D., Lestari, R., & Susanto, F. (2024). Paparan meme politik dan pengaruhnya terhadap sikap politik generasi Z. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 55–68. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/67509>
- Purwaningrum, P. W. (2020). Meme sebagai representasi kritik dan kebebasan berpendapat di ruang siber. *Wanastra: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 12(1), 61–68. <https://doi.org/10.31294/w.v12i1>
- Putra, A. S., Aditriyana, M. R., Widya, N. S., & Nurhadi, Z. F. (2023). Meme politik sebagai representasi komunikasi kritis di media sosial. *Jurnal Fusion*, 3(9). <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i09.363>
- Putri, D. A., & Fauzi, A. M. (2025). Representasi kritik politik terhadap isu Esemka dan Mahkamah Konstitusi melalui meme di Instagram. *Nama Jurnal*, 24(2).
- Sari, D. N., & Basit, A. (2020). Media sosial Instagram sebagai media informasi edukasi parenting. *Persepsi: Communication Journal*, 3(1), 23–36.
- Sari, D. N., & Ganiem, L. M. (2021). Semiotic analysis of gender equality representation in soy sauce product advertising. *Nyimak: Journal of Communication*, 5(2), 199–214.
- Suhantoro, I., & Sufyanto, S. (2024). Meme sebagai katalisator politik di media sosial Indonesia. *Interaction*, 1(2). <https://doi.org/10.47134/interaction.v1i2.2887>
- Suyanto, S. (2021). Kombinasi (mixed methods) dalam praktis penelitian ilmiah. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 123–130. <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/download/1145/759/2618>

- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.
- Widyaningsih, S., Ramadhan, A., & Prakoso, Y. (2025). Echo chamber effects in political memes: Reinforcing polarization in Indonesian social media. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 11(1), 112–128.
<https://journal.ubm.ac.id/index.php/bricolage/article/view/6228>
- Wijaya, R. (2021). Meme as political campaign strategy in Indonesia's presidential election. *Journal of Digital Discourse*, 8(2), 78–95.
- Zhang, X., Zhao, L., & Gupta, S. (2020). Social media and public opinion: The role of sentiment analysis in monitoring online discussions. *Journal of Strategic Marketing*, 28(1), 61–76.
-